

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anggaran berbasis kinerja dengan adanya reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era *New Public Management* telah membantu pemerintah dalam memperbaiki kinerja program yang akan dijalankan, salah satunya dengan pendekatan kinerja. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan pengertian Anggaran Sektor Publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Indikator kinerja dilihat dari sejauhmana kemampuan organisasi dalam mengoperasionliskan fungsi manajemennya dan menjadi tolak ukur kemampuan aparat dan merupakan wujud pertanggungjawaban (akuntabilitas). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat mengungkap suatu pertanggungjawaban hal-hal yang lebih penting dan lebih menyeluruh, dari awal perencanaan sampai kepada evaluasi suatu kegiatan aktivitas program yang merupakan bagian tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah.

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu : (1) anggaran terpadu (*unified budget*); (2) kerangka pengeluaran jangka menengah biasa disebut KPJM (*medium term expenditure framework*); dan (3) penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK (*performance based budget*). Dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Reformasi Keuangan Negara ditandai dengan adanya penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Namun, pada implementasinya masih menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya terkait pengendalian anggaran yang belum efektif. Hal ini memberikan implikasi yang cukup luas terhadap penyelenggaraan keuangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut berdampak pada realisasi anggaran daerah yang belum tersalur secara maksimal. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung telah menerapkan anggaran berbasis kinerja pada penyusunan anggarannya. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran yang telah disusun dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Efektivitas pengendalian anggaran merupakan salah satu kriteria aktivitas pengendalian, yaitu kepuasan kerja (*satisfaction*) atau tingkat kepuasan aparat dalam organisasi. Tingkat kepuasan kerja dapat diperoleh dari imbalan kerja yang

diberikan, baik materi maupun non materi, tetapi dapat juga dari hasil kerja yang dilakukan. Dalam jangka panjang suatu organisasi yang stabil adalah organisasi yang setiap anggotanya dinilai efektif, yaitu setiap anggotanya merasa puas.

Pentingnya dilakukannya penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dimana kinerja pemerintah yang saat ini banyak disoroti oleh masyarakat. Berdasarkan data LAKIP BKD tahun 2015, 2016 dan 2017 secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan realisasi anggaran dalam pelaksanaannya dan mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya seperti yang diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2015-2017

Realisasi Anggaran Tahun 2015-2017						Sumber Dana
Anggaran 2015	Realisasi 2015	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Anggaran 2017	Realisasi 2017	
34.560.453.693,03	32.639.193.713,00	37.261.900.690,00	35.075.749.521,00	21.736.159.134,00	14.365.794.409,00	APBD

Sumber Data : LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019

Tabel 1.2
Anggaran Belanja Pegawai
Tahun 2015-2017

URAIAN	ANGGARAN
Belanja pegawai (2015)	41.170.467.326.00
Belanja Pegawai (2016)	32.393.487.689.00
Belanja pegawai (2017)	57.737.681.838.00

Sumber Data: *Anggaran Belanja Pegawai Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019*

Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran Negara yang digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, honorarium, program atau kegiatan. Pada tabel diatas terlihat 3 tahun anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kab. Bandung dimana pada tahun 2015 sebesar Rp. 41.170.467.326.00 menurun ditahun 2016 sebesar Rp.32.393.487.689.00 dan mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar Rp.57.737.681.838.00.

Tabel 1.3
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2015-2017

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung (2015)	40.570.867.413,00	35.390.014.900,00
Belanja Langsung (2016)	34.560.453.693,03	32.639.193.713,00
Belanja Langsung (2017)	37.261.900.690,00	35.075.749.521,00

Sumber Data: *LRA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019*

Berdasarkan Tabel 1.1 1.2 dan 1.3 mengenai Capaian Kinerja Pegawai, Anggaran Belanja Pegawai dan Laporan Realisasi Anggaran BKD Kabupaten Bandung di atas. Fenomena dan permasalahan yang terjadi adalah berkaitan dengan penggunaan alokasi anggaran yang tidak terealisasi dengan optimal sesuai dengan rencana alokasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya apakah dengan tidak tetapnya anggaran belanja pegawai mempengaruhi kinerja. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara target anggaran dengan realiasi anggaran belanja langsung tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 dari data capaian kinerja program yang dituangkan dalam LAKIP, meskipun menurut pedoman penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dikategorikan baik, namun dalam efektivitas pengendalian anggaran masih belum optimal. Dapat dilihat anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk BKD selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi atau tidak stabil dan berdampak pada penyerapan anggarannya yang belum optimal tidak mencapai target 100%. Pada anggaran tahun 2015 adalah anggaran tertinggi selama 3 tahun terakhir sebesar Rp.34.560.453.693,03 dengan

realisasi anggaran Rp. 32.639.193.713,00 dengan presentase 94,44%. Pada tahun 2016 dimana anggaran belanja menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 37.261.900.690,00 begitupun dalam realisasi anggarannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp. 35.075.749.521,00 dengan presentase 94,13%. Terakhir pada tahun 2017 anggaran belanja yang diberikan pemerintah terhadap BKD mengalami penurunan anggaran dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 21.736.159.134,00 dengan realsiasi sebesar Rp. 14.365.794.409,00 dengan presentase 87,23%. Berdasarkan permasalahan di atas dapat diidentifikasi bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja masih belum berjalan dengan optimal di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dengan rincian data diatas bahwa realisasi anggaran masih belum 100% mencapai target anggaran yang telah direncanakan, sehingga dalam hal ini Efektivitas Pengendalian Anggaran dalam pencapaian targetnya kurang baik dan harus adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi dalam menjelaskan proses dari hasil yang telah dicapai.

Berdasarkan perhitungan dan analisis kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara membandingkan rencana kinerja dengan tingkat realisasi, ternyata tingkat pencapaian atas kegiatan dan sasaran menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 94,44% dan pada tahun 2016 yaitu 94,13% 2017 yaitu 87,23%,. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa terjadi fluktuasi anggaran yaitu penurunan pada realisasi anggaran tahun 2014 ke tahun 2015 kemudian peningkatan realiasi anggaran pada tahun 2015 ke tahun 2017.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini diharapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian anggaran, dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya *output* optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien dan efektif di dalam pelaksanaannya dan mencapai suatu hasil (*outcome*). Kemudian melakukan penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berupa hasil yang diperoleh (fokus pada hasil).

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian anggaran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung masih belum optimal. Hal ini diindikasikan karena penerapan anggaran berbasis kinerja yang masih belum dapat diterapkan dengan baik, karena berbagai faktor, diantaranya :

1. Jumlah Sumber Daya Aparatur tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Kurangnya pemahaman dalam optimalisasi perencanaan, pengendalian anggaran.
3. Belum optimalnya sistem pengendalian internal.

4. Terjadinya fluktuasi atau ketidak stabilan target anggaran dan realisasi di tiap tahunnya.
5. Tidak tercapainya target anggaran yang telah direncanakan selama tahun terkahir.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015-2017”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dalam optimalisasi perencanaan, pengendalian anggaran.
2. Belum optimalnya sistem pengendalian internal.
3. Terjadinya fluktuasi atau ketidak stabilan target anggaran dan realisasi di tiap tahunnya.
4. Tidak tercapainya target anggaran yang telah direncanakan selama tahun terkahir

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh ekonomis terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh efisiensi terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh efektivitas terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
4. Seberapabesarpengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung”.

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ekonomis terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efisiensi terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta sumbangan pemikiran dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu sosial, serta menambah wawasan dalam keilmuan Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk memperluas kemampuan berfikir dan menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.

- b. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kerja terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang berkaitan

dengan Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.

c. Bagi peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi selanjutnya dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih spesifik dan lebih mendalam.

1.6. Kerangka Pemikiran

Fokus pemikiran penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran yang menjelaskan salah satu pelaksanaan dari kegiatan Administrasi Negara, khususnya administrasi keuangan negara.

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan cukup penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Menurut M. Nafarin (2007:11) mengemukakan bahwa anggaran adalah :”Suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah ditetapkan.”

Anggaran merupakan rencana kerja suatu perusahaan yang disusun untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan pada program-program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan pengertian anggaran menurut Sony Yuwono, dkk (2005:27) adalah sebagai berikut :”Suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang

(perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi.”

Anggaran merupakan rincian kegiatan perolehan dan penggunaan sumber-sumber yang dimiliki dan disusun secara formal dan dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Anggaran disebut juga sebagai perencanaan keuangan organisasi. Penyusunan anggaran merupakan tahapan awal dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam membuat rencana-rencana kerja. Dasar penyusunan anggaran pada rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program (*programming*). Menurut M. Narifin (2007:12) dikemukakan bahwa dalam penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.
2. Data-data waktu yang lalu.
3. Kemungkinan perkembangan kondisi.
4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing dan gerak gerik pesaing.
5. Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah.
6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran tersebut pada uraian diatas berguna supaya anggaran yang dihasilkan dapat lebih menyeluruh dan akurat sehingga tujuan dan sasaran organisasi ataupun perusahaan dapat tercapai.

Menurut Bastian (2010:107) pengertian anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat

erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. *Performance budgeting* mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran *output* (*output measurement*) sebagai indikator kinerja organisasi. Anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Adapun indikator anggaran terkait ekonomis, efisiensi, dan efektivitas adalah sebagai berikut (Bastian, 2010:118):

1. Ekonomis

Indikator ekonomis merupakan indikator tentang penggunaan *input*. Pada dasarnya ekonomi lebih kepada *input*, efisiensi tentang *input* dan *output*, serta efektivitas yang berhubungan dengan *output*.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan hal terpenting, yaitu dengan rumusan *output* dibagi *input*. Suatu organisasi dianggap semakin efisien apabila rasio efisien cenderung diatas satu. Apabila hasil rasio lebih besar dari satu dibandingkan hasil rasio program yang sama, program tersebut bisa disebut lebih efisien. Oleh karena itu, efisien dapat dikembangkan dengan empat cara:

- a. Dengan menaikkan *output* untuk *input* yang sama.

- b. Dengan menaikkan *output* lebih besar dibandingkan proporsi peningkatan *input*.
- c. Dengan menurunkan input untuk *output* yang sama.
- d. Dengan menurunkan *input* lebih besar dibandingkan proporsi gambaran *output*. *Input*, sebagai penyebut, lebih sering dipertimbangkan sebagai faktor pengubah kebijakan organisasi sektor publik.

3. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Tujuan-tujuan organisasi harus spesifik, detail, dan terukur. Dalam rangka mencapai tujuan itu, organisasi sektor publik sering kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti itu bisa terjadi, apabila efisiensi biaya bukan merupakan salah satu dari indikator hasil.

Efektivitas Pengendalian anggaran Menurut Mardiasmo (2002:105) mengungkapkan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hasil prestasi yang dicapai suatu organisasi (Maman Ukas, 2004:56).

Efektivitas secara umum adalah berkaitan dengan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan dicapainya tujuan dari suatu organisasi tertentu maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif.

Menurut Mardiasmo (2005:132) menyatakan pengertian efektivitas sebagai berikut, “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.”

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya operasional serta untuk mendorong dipatuhinya suatu kebijakan perusahaan terutama yang berhubungan dengan biaya operasional maka diperlukan perencanaan dan pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dianggarkan dengan hasil yang diperoleh untuk menjamin bahwa tingkat pengeluaran tidak dilampaui dan tingkat aktivitas yang direncanakan tercapai.

Menurut Mulyadi (2002:180) mendefinisikan pengendalian sebagai berikut:

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang didisain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini yaitu, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisien operasi.”

Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensinya sehingga terciptanya suatu efektivitas pengendalian. Pengendalian keuangan berhubungan dengan aktivitas pengeluaran pengendalian keuangan merupakan pencapaian anggaran dibanding dengan anggarannya.

Sedangkan pengendalian kinerja merupakan pencapaian kinerja dibanding dengan anggarannya.

Menurut Mardiasmo (2009:3-7) dimensi efektivitas pengendalian anggaran adalah sebagai berikut:

1. *Output*

Output (keluaran) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan/*input* yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.

2. *Outcome*

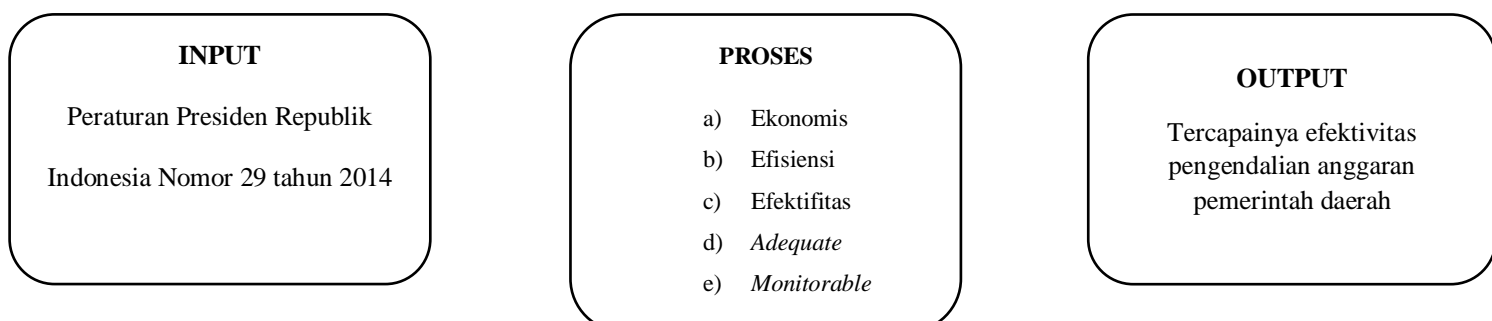
Outcome (hasil) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Untuk memperjelas pengaruh dari masing-masing variabel, maka disajikan skema kerangka berfikir sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.1

Skema Kerangka Berfikir





1.7. Hipotesis

H₁: Adanya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran belanjadaerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2015-2017.

1. Adanya pengaruh ekonomis terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
2. Adanya pengaruh efisiensi terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
3. Adanya pengaruh efektivitas terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
4. Adanya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran belanjadaerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2015-2017.

H₀: Tidak adanya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran belanjadaerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2015-2017

1. Tidak adanya pengaruh ekonomis terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
2. Tidak adanya pengaruh efisiensi terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
3. Tidak adanya pengaruh efektivitas terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
4. Tidak adanya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran belanjadaerahBadan Keuangan Daerah Kabupaten Tahun 2015-2017.

